



Dinamika Politik Identitas dalam Pemilu: Studi Kasus Peran Agama dalam Strategi Kampanye Anies Baswedan

Ramadhan Kynan Dyfan Hartanta, Nabhan Ulinnuha, Axl Moedrha Angkasa[✉], Kevin Eka Pratisto

Political Science, FISIP, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Disubmit: Desember

Direvisi: April

Diterima: April

Keywords:

identity politics; religion and politics; election campaign; democracy

Abstrak

Artikel ini membahas dinamika politik identitas dalam pemilihan umum di Indonesia dengan menyoroti peran agama dalam strategi kampanye Anies Baswedan. Agama semakin menempati posisi penting dalam mobilisasi politik sebagai sumber legitimasi moral, identifikasi pemilih, dan penguatan basis dukungan elektoral. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan analisis data sekunder, wacana publik, serta kajian literatur yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa agama tidak hanya berfungsi sebagai identitas kultural, tetapi juga sebagai instrumen politik yang membentuk persepsi pemilih dan memperkuat solidaritas kelompok. Namun, politisasi agama juga memunculkan dampak berupa polarisasi sosial dan tantangan terhadap inklusivitas demokrasi serta kohesi nasional. Artikel ini menegaskan pentingnya komunikasi politik yang beretika dan inklusif agar strategi politik berbasis identitas tidak menggerus nilai pluralisme dan demokrasi di Indonesia.

Abstract

This article examines the dynamics of identity politics in Indonesian general elections by focusing on the role of religion in Anies Baswedan's campaign strategy. Religion has increasingly become a central element in political mobilization, serving as a source of moral legitimacy, voter identification, and electoral support. Using a qualitative-descriptive approach based on secondary data analysis, public discourse, and relevant literature, this study analyzes how religious narratives, symbols, and networks were strategically employed to strengthen Anies Baswedan's political image and voter base. The findings indicate that religion functioned not only as a cultural identity but also as a political instrument that shaped voter perception and reinforced group solidarity. However, the politicization of religion also generated social polarization and posed challenges to democratic inclusivity and national cohesion. This study highlights the need for ethical and inclusive political communication to ensure that identity-based strategies do not undermine pluralism and democratic values in Indonesia.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi modern karena menjadi sarana perwujudan kedaulatan rakyat dalam menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan publik. Dalam konteks Indonesia sebagai negara demokrasi dengan tingkat keberagaman sosial, budaya, dan agama yang tinggi, proses pemilu tidak hanya ditentukan oleh adu gagasan dan program kerja, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor identitas sosial. Identitas tersebut mencakup agama, etnis, budaya, dan kelompok sosial yang membentuk preferensi politik masyarakat. Menurut International IDEA (2021), demokrasi di negara multikultural menghadapi tantangan serius ketika identitas kolektif digunakan sebagai alat mobilisasi politik yang menggeser rasionalitas pemilih dari evaluasi kebijakan menuju loyalitas kelompok.

Dalam beberapa tahun terakhir, politik identitas menunjukkan intensitas yang semakin menguat dalam kontestasi elektoral di Indonesia. Fenomena ini tampak dari maraknya penggunaan simbol-simbol keagamaan, narasi moral, dan dukungan tokoh agama dalam kampanye politik. Menurut laporan Center for Strategic and International Studies/CSIS (2022), agama menjadi salah satu variabel paling dominan yang memengaruhi perilaku pemilih dalam pemilu, terutama di kalangan masyarakat religius. Hal ini menunjukkan bahwa agama tidak lagi sekadar menjadi urusan privat, melainkan telah bertransformasi menjadi sumber legitimasi politik dan alat komunikasi elektoral yang efektif.

Agama memiliki posisi strategis dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia karena berfungsi sebagai pedoman nilai, norma, dan identitas kolektif. Ketika agama diintegrasikan ke dalam praktik politik, ia mampu membentuk persepsi moral tentang kepemimpinan, keadilan, keberpihakan. Menurut laporan Foundation (2021), penggunaan keagamaan dalam politik sering kali dikaitkan dengan klaim moralitas, di mana kandidat tertentu diposisikan sebagai representasi nilai-nilai agama yang dianggap ideal. Dalam kondisi ini, pilihan politik masyarakat tidak hanya didasarkan pada

pertimbangan rasional, tetapi juga pada kesamaan iman dan sentimen keagamaan.

Fenomena politik identitas berbasis agama menjadi semakin signifikan dalam era digital dan media sosial. Media digital mempercepat penyebaran pesan politik bernuansa keagamaan, baik melalui ceramah daring, konten dakwah politik, maupun kampanye simbolik di platform media sosial. Menurut laporan We Are Social dan Hootsuite (2023), media sosial menjadi ruang utama penyebaran narasi politik identitas di Indonesia, di mana pesan-pesan berbasis agama lebih mudah diterima karena bersifat emosional dan normatif. Kondisi ini memperkuat pengaruh tokoh agama dan komunitas keagamaan sebagai opinion leader dalam membentuk preferensi politik masyarakat.

Anies Baswedan muncul sebagai figur politik yang kerap diasosiasikan dengan penggunaan strategi politik identitas berbasis agama. Dalam berbagai momentum politik, Anies terlihat aktif menghadiri kegiatan keagamaan, menjalin relasi dengan ulama, habaib, dan tokoh ormas Islam, serta menyampaikan pesan-pesan moral yang resonan dengan nilai keumatan. Menurut analisis Tempo.co (2023), citra Anies sebagai pemimpin religius dibangun secara konsisten melalui simbol, bahasa, dan jaringan keagamaan yang menguatkan kedekatannya dengan pemilih Muslim. Dukungan terbuka dari tokoh agama tidak hanya berfungsi sebagai legitimasi simbolik, tetapi juga sebagai sarana mobilisasi dan Wahid narasi massa yang efektif.

Strategi ini menjadikan agama sebagai elemen penting dalam pembentukan identitas politik Anies Baswedan. Narasi seperti keadilan sosial, kepemimpinan berakhlak, dan perjuangan umat sering dikaitkan dengan visi politik yang diusung. Menurut laporan BBC News Indonesia (2024), pendekatan tersebut berhasil menciptakan ikatan emosional yang kuat dengan sebagian pemilih, khususnya kelompok religius yang merasa aspirasinya terwakili. Dalam konteks ini, agama berfungsi sebagai jembatan antara pesan politik dan nilai moral yang diyakini masyarakat.

Penguatan politik identitas berbasis agama juga memunculkan konsekuensi sosial dan politik yang kompleks. Di satu sisi, strategi ini mampu meningkatkan partisipasi politik masyarakat yang sebelumnya apatis, dengan menghadirkan pemilu sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan keagamaan. Menurut Komisi Pemilihan Umum/KPU (2024), partisipasi pemilih menunjukkan peningkatan signifikan di wilayah dengan mobilisasi komunitas keagamaan yang kuat. Hal ini mengindikasikan bahwa agama dapat menjadi faktor pendorong keterlibatan warga dalam proses demokrasi. Politisasi agama berpotensi memperkuat polarisasi sosial dan mempersempit ruang dialog publik. Narasi keagamaan yang dikonstruksi secara eksklusif dapat melahirkan dikotomi antara kelompok “kami” dan “mereka”, serta antara pemimpin yang dianggap seiman dan yang dianggap kurang religius. Menurut laporan Setara Institute (2022), politik identitas berbasis agama berkontribusi terhadap meningkatnya intoleransi dan ketegangan sosial, terutama ketika agama digunakan untuk mendeligitimasi lawan politik. Kondisi ini berisiko menggeser demokrasi dari arena kompetisi ide menuju konflik identitas.

Terdapat risiko reduksi nilai agama menjadi sekadar alat politik kekuasaan. Ketika agama direproduksi hanya sebagai instrumen elektoral, nilai-nilai universal seperti kemanusiaan, keadilan, dan persatuan berpotensi terdistorsi oleh kepentingan pragmatis. Menurut laporan United Nations Development Programme/UNDP (2020), demokrasi yang sehat menuntut pemisahan yang seimbang antara ekspresi identitas dan penghormatan terhadap prinsip inklusivitas serta hak asasi manusia. Oleh karena itu, penggunaan agama dalam politik harus ditempatkan dalam kerangka etika demokrasi yang menjunjung pluralisme, kajian mengenai peran agama dalam strategi kampanye Anies Baswedan menjadi penting untuk memahami bagaimana politik identitas bekerja dalam pemilu Indonesia serta dampaknya terhadap kualitas demokrasi. Analisis ini tidak hanya relevan untuk melihat efektivitas strategi politik berbasis identitas, tetapi juga untuk mengevaluasi implikasinya terhadap kohesi

sosial, toleransi, dan keberlanjutan demokrasi di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam memahami relasi antara agama, politik identitas, dan praktik demokrasi di tengah masyarakat multikultural.

LITERATUR REVIEW

Politik Identitas dan Peran Agama dalam Politik Elektoral

Politik identitas merupakan fenomena politik yang muncul ketika identitas sosial tertentu—seperti agama, etnis, ras, atau budaya—digunakan sebagai dasar utama dalam mobilisasi politik dan pembentukan preferensi pemilih. Dalam konteks demokrasi modern, politik identitas sering berkembang di masyarakat multikultural sebagai respons atas ketimpangan representasi, krisis kepercayaan terhadap institusi politik, serta meningkatnya kebutuhan akan rasa keterikatan sosial. Menurut International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA, 2021), politik identitas menjadi semakin menonjol ketika aktor politik memanfaatkan identitas kolektif untuk membangun loyalitas pemilih secara emosional, bukan rasional.

Agama merupakan salah satu bentuk identitas yang paling kuat dalam politik identitas karena memiliki dimensi moral, transendental, dan simbolik yang mendalam. Agama tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga membentuk norma sosial, etika publik, dan orientasi politik individu. Menurut Pew Research Center (2021), identitas keagamaan memiliki pengaruh signifikan terhadap sikap politik dan pilihan elektoral di berbagai negara demokrasi, termasuk Indonesia. Hal ini menjadikan agama sebagai sumber daya politik yang strategis bagi kandidat maupun partai politik.

Dalam praktik politik elektoral, agama sering digunakan sebagai sarana legitimasi moral. Kandidat yang diasosiasikan dengan nilai-nilai religius tertentu cenderung dipersepsikan sebagai pemimpin yang berakhlak, amanah, dan berpihak pada kepentingan umat. Menurut laporan Wahid Foundation (2021), politisi di Indonesia kerap menggunakan simbol, bahasa,

dan narasi keagamaan untuk membangun citra moral yang positif di mata pemilih. Strategi ini efektif karena mampu menciptakan kesamaan identitas antara kandidat dan pemilih, sehingga memperkuat loyalitas politik berbasis iman, penggunaan agama dalam politik identitas juga mengandung potensi eksklusivitas. Ketika agama dijadikan alat diferensiasi politik, pilihan politik dapat dipersepsikan sebagai pilihan iman, bukan lagi sebagai evaluasi kebijakan publik. Menurut laporan Setara Institute (2022), politisasi agama dalam kontestasi elektoral berkontribusi terhadap meningkatnya polarisasi sosial dan intoleransi, terutama ketika agama digunakan untuk mendeligitimasi lawan politik. Dengan demikian, agama dalam politik identitas memiliki dua sisi: sebagai sarana mobilisasi partisipasi politik sekaligus sebagai potensi sumber konflik sosial.

Teori Pluralisme Politik dan Demokrasi Inklusif

Teori pluralisme politik menekankan bahwa demokrasi yang sehat harus mampu mengakomodasi keberagaman identitas tanpa memberikan dominasi kepada satu kelompok tertentu. Dalam perspektif pluralisme, negara berperan sebagai penjamin kesetaraan seluruh warga negara, terlepas dari latar belakang agama, etnis, maupun budaya. Menurut United Nations Development Programme (UNDP, 2020), pluralisme merupakan prasyarat penting bagi demokrasi berkelanjutan di masyarakat multikultural karena mencegah eksklusi sosial dan konflik berbasis identitas. Dalam kerangka pluralisme, ekspresi identitas keagamaan dalam politik diperbolehkan sejauh tidak mengancam hak kelompok lain dan tetap berada dalam prinsip inklusivitas. Demokrasi tidak menuntut penghapusan identitas, tetapi mengatur agar identitas tidak dijadikan alat dominasi. Menurut laporan Freedom House (2022), tantangan utama demokrasi saat ini bukanlah keberadaan identitas dalam politik, melainkan ketika identitas tersebut dimanipulasi untuk membenarkan diskriminasi dan pembatasan hak politik kelompok lain.

Pluralisme memiliki landasan normatif yang kuat melalui Pancasila dan konstitusi yang

menjamin kebebasan beragama serta kesetaraan warga negara. Namun, dalam praktik politik elektoral, nilai pluralisme sering berbenturan dengan strategi politik identitas yang bersifat eksklusif. Menurut analisis CSIS Indonesia (2023), meningkatnya penggunaan narasi keagamaan dalam kampanye politik berpotensi menggeser semangat pluralisme menuju kompetisi identitas yang sempit. Kondisi ini menuntut adanya komitmen etis dari elite politik untuk menjaga keseimbangan antara aspirasi identitas dan kepentingan nasional.

Pluralisme politik juga menekankan pentingnya dialog antaridentitas. Demokrasi yang inklusif mendorong kompetisi gagasan, bukan kompetisi iman. Menurut laporan UNESCO (2021), dialog lintas agama dan budaya merupakan instrumen penting dalam mencegah fragmentasi sosial akibat politisasi identitas. Oleh karena itu, penerapan pluralisme dalam konteks politik identitas berbasis agama menuntut kebijakan dan komunikasi politik yang menekankan persatuan dalam keberagaman.

Teori Hegemoni dan Mobilisasi Politik Berbasis Agama

Teori hegemoni menjelaskan bagaimana nilai, ide, dan simbol tertentu dapat dinormalisasi dalam ruang publik sehingga diterima sebagai kebenaran umum. Dalam politik elektoral, hegemoni bekerja melalui produksi wacana yang membingkai realitas politik sesuai kepentingan aktor dominan. Menurut Laclau dan Mouffe yang dikaji ulang dalam konteks kontemporer oleh Howarth (2020), hegemoni politik dibangun melalui narasi yang mampu menyatukan identitas kolektif di bawah satu makna dominan.

Agama memiliki potensi hegemonik yang kuat karena mengandung klaim kebenaran moral dan otoritas simbolik. Ketika nilai-nilai keagamaan dilekatkan pada figur politik tertentu, pilihan politik dapat dikonstruksikan sebagai pilihan yang secara moral “benar”. Menurut laporan BBC News Indonesia (2024), narasi religius dalam kampanye politik sering digunakan untuk membentuk persepsi bahwa mendukung kandidat tertentu merupakan bagian dari tanggung jawab keagamaan. Dalam

kerangka ini, agama tidak hanya menjadi identitas, tetapi juga alat framing politik yang memengaruhi kesadaran kolektif pemilih.

Mobilisasi politik berbasis agama juga diperkuat oleh peran tokoh agama sebagai opinion leader. Tokoh agama memiliki otoritas moral yang tinggi dan dipercaya oleh komunitasnya, sehingga dukungan politik yang mereka berikan dapat memengaruhi perilaku pemilih secara signifikan. Menurut Pew Research Center (2022), endorsement politik dari pemimpin agama memiliki dampak elektoral yang lebih kuat dibandingkan endorsement dari selebritas atau elite politik biasa, terutama di masyarakat religius, hegemoni agama dalam politik juga mengandung risiko. Ketika satu narasi keagamaan mendominasi ruang publik, suara alternatif dapat terpinggirkan. Menurut laporan Amnesty International (2021), dominasi wacana identitas dalam politik berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dan mempersempit ruang demokrasi. Oleh karena itu, penggunaan agama sebagai alat hegemoni politik harus dikritisi agar tidak merusak prinsip demokrasi deliberatif yang menjunjung keberagaman pandangan.

Berdasarkan kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa politik identitas berbasis agama merupakan fenomena kompleks yang memiliki dampak multidimensional terhadap demokrasi. Agama berfungsi sebagai sumber legitimasi moral, alat mobilisasi politik, dan instrumen pembentukan hegemoni. Dalam perspektif pluralisme, penggunaan agama dalam politik harus dibatasi oleh prinsip inklusivitas dan toleransi. Sementara itu, teori hegemoni mengingatkan bahwa normalisasi narasi keagamaan dalam politik dapat membentuk kesadaran kolektif pemilih secara tidak seimbang.

Dengan demikian, literatur menunjukkan bahwa politik identitas berbasis agama dapat memperkuat partisipasi politik, tetapi juga berpotensi mengancam kohesi sosial dan kualitas demokrasi jika tidak dikelola secara etis. Kerangka teoritis ini menjadi dasar penting untuk menganalisis strategi kampanye Anies Baswedan dan dampaknya terhadap dinamika politik elektoral di Indonesia.

Pengelolaan Potensi Lokal (Studi Desa Wisata)

Pengelolaan potensi lokal, terutama dalam konteks desa wisata, menjadi salah satu strategi pembangunan desa yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Desa wisata merupakan contoh nyata bagaimana pemerintah desa harus mampu menavigasi regulasi lintas sektor, mulai dari perizinan tata ruang, pengelolaan lahan, hingga kerja sama dengan pihak ketiga, misalnya Perhutani atau swasta, untuk pengelolaan fasilitas wisata. Perjanjian kerja sama ini mengatur hak, kewajiban, dan pembagian hasil, sehingga pengelolaan potensi lokal menuntut kemampuan administratif, pemahaman hukum, dan kapasitas koordinasi yang memadai.

Partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan desa wisata. Warga dilibatkan sebagai pelaku usaha, pemandu wisata, penyedia jasa akomodasi, dan tenaga pendukung lainnya, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan secara langsung. Keterlibatan ini juga memastikan pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam setiap aktivitas pariwisata. Meski demikian, desa wisata sering menghadapi tantangan berupa tumpang tindih regulasi antar kementerian, khususnya yang berkaitan dengan urusan desa, pariwisata, dan kehutanan. Tantangan ini menuntut kemampuan adaptif pemerintah desa dalam menavigasi regulasi yang kompleks, mengelola kepentingan berbagai pihak, dan menjaga keberlanjutan ekonomi serta kultural desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan dalam kajian ini menunjukkan bahwa strategi kampanye Anies Baswedan merepresentasikan praktik politik identitas berbasis agama yang terstruktur dan konsisten. Agama digunakan tidak hanya sebagai identitas kultural, tetapi juga sebagai instrumen politik untuk membangun legitimasi moral dan kedekatan emosional dengan pemilih. Hal ini tampak dari intensitas kehadiran Anies dalam kegiatan keagamaan, penggunaan simbol dan bahasa religius dalam kampanye, serta keterlibatan aktif tokoh agama dalam memberikan dukungan politik. Penggunaan

narasi keagamaan berfungsi sebagai strategi framing politik yang efektif. Agama diposisikan sebagai sumber nilai etis yang membedakan Anies dari kandidat lain, terutama melalui penekanan pada citra pemimpin berakhlak, adil, dan berpihak pada umat. Temuan ini sejalan dengan teori politik identitas yang menyatakan bahwa identitas kolektif dapat memperkuat loyalitas politik dengan membangun rasa kebersamaan dan kesamaan nilai antara kandidat dan pemilih. Dalam konteks ini, agama menjadi medium utama pembentukan identitas politik Anies Baswedan.

Dukungan tokoh agama, ulama, dan jaringan keagamaan juga terbukti memainkan peran penting dalam mobilisasi politik. Tokoh agama berfungsi sebagai opinion leader yang memiliki otoritas moral tinggi di tengah masyarakat religius. Dukungan yang disampaikan melalui ceramah, pengajian, dan forum keagamaan menciptakan legitimasi sosial yang kuat dan memengaruhi preferensi pemilih secara signifikan. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa agama dalam politik elektoral tidak hanya bekerja pada level simbolik, tetapi juga melalui struktur sosial dan jaringan komunitas yang mapan, politik identitas berbasis agama dalam kampanye Anies Baswedan menunjukkan implikasi ganda. Dampak positifnya terlihat pada meningkatnya partisipasi politik kelompok masyarakat religius yang sebelumnya kurang terlibat dalam proses pemilu. Narasi bahwa keterlibatan politik merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan keagamaan mendorong pemilih untuk berpartisipasi secara aktif. Hal ini memperlihatkan bahwa agama dapat berfungsi sebagai sarana integrasi politik dalam demokrasi.

Penggunaan agama sebagai alat diferensiasi politik berisiko menciptakan dikotomi antara kelompok “seiman” dan “non-seiman”, serta mempersempit ruang dialog politik yang rasional. Politik yang terlalu bertumpu pada identitas dapat menggeser orientasi pemilih dari evaluasi program dan kebijakan menuju loyalitas emosional berbasis iman. Kondisi ini berpotensi melemahkan prinsip pluralisme dan inklusivitas dalam demokrasi

Indonesia. Secara keseluruhan, temuan dan diskusi menunjukkan bahwa strategi politik identitas berbasis agama yang digunakan Anies Baswedan efektif secara elektoral, tetapi menyimpan tantangan serius bagi kohesi sosial dan kualitas demokrasi. Oleh karena itu, praktik politik identitas memerlukan pengelolaan yang beretika dan bertanggung jawab agar tidak mereduksi agama menjadi sekadar alat kekuasaan serta tetap sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan pluralisme.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa politik identitas berbasis agama memainkan peran yang signifikan dalam dinamika pemilu di Indonesia, khususnya dalam strategi kampanye Anies Baswedan. Agama digunakan sebagai sumber legitimasi moral, alat pembentukan identitas politik, serta sarana mobilisasi dukungan elektoral. Melalui pemanfaatan simbol, narasi, dan jaringan keagamaan, Anies Baswedan berhasil membangun kedekatan emosional dengan pemilih religius dan memperkuat citra sebagai pemimpin yang berakhlak serta berpihak pada nilai-nilai keumatan. Strategi politik identitas berbasis agama terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, terutama kelompok pemilih yang memiliki keterikatan kuat terhadap nilai dan otoritas keagamaan. Agama mampu menjadi medium integrasi politik yang mendorong keterlibatan warga dalam proses demokrasi, serta menjadi saluran artikulasi aspirasi moral dan sosial di ruang publik. Dalam konteks ini, politik identitas tidak semata-mata bersifat negatif, tetapi juga memiliki potensi memperluas basis partisipasi demokratis.

Penggunaan agama sebagai instrumen politik juga menghadirkan tantangan serius bagi keberlangsungan demokrasi yang inklusif. Politisasi agama berpotensi memicu polarisasi sosial, memperkuat eksklusivisme identitas, serta menggeser orientasi politik masyarakat dari rasionalitas kebijakan menuju loyalitas berbasis iman. Apabila tidak dikelola secara etis, praktik ini dapat mengancam nilai pluralisme, toleransi,

dan kohesi sosial yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan komitmen kuat dari elite politik dan tokoh agama untuk menjaga keseimbangan antara ekspresi identitas keagamaan dan prinsip demokrasi inklusif. Politik identitas harus diarahkan pada penguatan etika publik dan persatuan nasional, bukan sebagai alat delegitimasi kelompok lain. Dengan pendekatan yang bertanggung jawab dan beretika, demokrasi Indonesia dapat tetap berkembang secara sehat di tengah keberagaman identitas sosial dan agama yang dimilikinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International. (2021). Global trends: Attacks on freedom of expression and civic space. <https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/4872/2021/en/>
- BBC News Indonesia. (2024). Politik identitas dan peran agama dalam kontestasi politik Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia>
- Center for Strategic and International Studies (CSIS). (2022). Agama, politik, dan perilaku pemilih di Indonesia. <https://www.csis.or.id>
- Center for Strategic and International Studies (CSIS). (2023). Demokrasi, pluralisme, dan tantangan politik identitas. <https://www.csis.or.id/publications>
- Freedom House. (2022). Freedom in the world 2022: The global expansion of authoritarian rule. <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2022>
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA). (2021). Global state of democracy report 2021. <https://www.idea.int/gsod>
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2024). Laporan partisipasi pemilih Pemilu 2024. <https://www.kpu.go.id>
- Pew Research Center. (2021). Religion and political identity in democratic societies. <https://www.pewresearch.org>
- Pew Research Center. (2022). Religious leaders and political influence. <https://www.pewresearch.org/religion>
- Setara Institute. (2022). Laporan kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. <https://setara-institute.org>
- Tempo.co. (2023). Strategi politik identitas dalam kampanye Anies Baswedan. <https://nasional.tempo.co>
- United Nations Development Programme (UNDP). (2020). Human development report 2020: The next frontier. <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2020>
- UNESCO. (2021). Re|shaping cultural policies for inclusive development. <https://www.unesco.org>
- Wahid Foundation. (2021). Agama dan demokrasi: Tantangan politik identitas di Indonesia. <https://wahidfoundation.org>
- We Are Social & Hootsuite. (2023). Digital 2023: Indonesia. <https://www.datareportal.com/reports/digital-2023-indonesia>